

## ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sakral, karena berlandaskan keagamaan dan menyebutkan nama Tuhan, seperti disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pancasila sila pertama. Dalam hal perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, banyak masalah yang dapat membuat pernikahan tidak dapat dipertahankan dan jalan perceraian terpaksa di tempuh. Alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam ada dua alasan tambahan yang tidak ada pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu, murtad dan melanggar *ta'lik* talak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perceraian karena *ta'lik* talak pada putusan Nomor 2160/Pdt.G/2016/PA.Clp. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2160/Pdt.G/2016/PA.Clp, Majelis Hakim dengan pertimbangannya mendasarkan pada Pasal 19 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena perbuatan Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya dan membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama enam bulan berturut-turut. Menurut peneliti, hakim menjatuhkan talak satu khul'i yang mendasarkan pada pelanggaran *ta'lik* talak belum lengkap karena masih ada dasar hukum yang belum di masukan oleh hakim yaitu Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kata Kunci : Perceraian, *Ta'lik* Talak.

## ABSTRACT

Marriage in Indonesia is something that can be said sacred, because it is based on religion and mention the name of God, as mentioned in Article 1 of Law Number 1 Year 1974 and Pancasila first sila. In the case of marriage does not always go as expected, many problems that can make marriage unbearable and divorce roads are forced to go. The reasons for divorce are stipulated in Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 of the Compilation of Islamic Law. In the Compilation of Islamic Law there are two additional reasons that do not exist in Article 19 of Government Regulation Number 9 Year 1975 namely, apostasy and violate *ta'lik talak*.

Problems in this research is how the judge's judgment in deciding divorce due *ta'lik talak* on decision Number 2160 / Pdt.G / 2016 / PA.Clp. This study uses the normative juridical approach.

Based on the result of research and discussion, it can be concluded that on the Decision of Cilacap Religious Court Number 2160 / Pdt.G / 2016 / PA.Clp, the Panel of Judges with its consideration based on Article 19 letter (b) PP No.9 Tahun 1975 jo Article 116 letter (g) Compilation of Islamic Law, because the Defendant's acts do not provide for three months' mandatory maintenance and allow or disregard the Plaintiff for six consecutive months. According to the researcher, the judge overthrew one divorce of *khul'i* based on the *ta'lik talak* violation is not yet complete because there is still legal basis which has not been input by the judge namely Article 73 paragraph (1) Law Number 7 Year 1989 about Religious Court.

Keywords : *Divorce, Ta'lik Talak*